

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- MPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", (Jakarta: MPR RI, 2002).
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara", (Jakarta: DPR RI, 2004), LN Nomor 5, TLN Nomor 4355.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan-negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019", (Jakarta: DPR RI, 2020), LN No.134 Tahun 2020, TLN No.6516.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik", (Jakarta: DPR RI, 2011), LN Nomor 51, TLN Nomor 5215.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya", (Jakarta: DPR RI, 1946).
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", (Jakarta: DPR RI, 2014), LN No.7 Tahun 2014, TLN No.5495.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan", (Jakarta: DPR RI, 2009), LN No.8 Tahun 2009, TLN No.4902.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah", (Jakarta: DPR RI, 2015), LN No.7 Tahun 2015, TLN No.5495.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan", (Jakarta: DPR RI, 2016), LN No.70 Tahun 2016, TLN No.5872.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019", (Jakarta: DPR RI, 2019), LN Nomor 82, TLN Nomor 5234.

- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan-negara", (Jakarta: DPR RI, 2014) , LN Nomor 66, TLN Nomor 4400.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan", (Jakarta: DPR RI, 2006) , LN Nomor 85, TLN Nomor 4654.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perpu No.5/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang", (Jakarta: DPR RI, 2009), LN No.211 Tahun 2009, TLN No.4953.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan-negara", (Jakarta: DPR RI, 2003), LN Nomor 47, TLN Nomor 4286.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3" (Jakarta: DPR RI, 2014), LN Nomor 182, TLN Nomor 5568.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN TA 2020", (Jakarta: DPR RI, 2019), LN No.198 Tahun 2019, TLN No.6410.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia", (Jakarta: DPR RI, 1999), LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3843.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", (Jakarta: DPR RI, 2004), LN No.126 Tahun 2004, TLN No.4438.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", (Jakarta: DPR RI, 2009), LN No.144 Tahun 2009, TLN No.5063.
- DPR RI, "Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" dan Penetapan "Keadaan Bahaya", (Jakarta: DPR RI, 1957), LN Nomor 160 Tahun 1957, TLN Nomor 1485.
- Presiden RI, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang N0.74 Tahun 1957 dan Penetapan Bahaya", (Jakarta: Menteri Muda Kehakiman, 1959), LN Nomor 139, TLN Nomor 1908.
- Presiden RI, " Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan-negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2020), LN Nomor 87, TLN Nomor 6485.

Presiden RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2005), LN Nomor 49, TLN Nomor 4503.

Presiden RI, "Keppres No.12/2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2020).

BPK RI, "Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan-negara", (Jakarta: BPK RI, 2017), LN Nomor 42, TLN Nomor 4707.

BPK RI, “Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan”, (Jakarta: BPK RI, 2015).

BPK RI, "Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2020", (Jakarta: BPK RI, 2015).

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi, “Risalah Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 tanggal 29 April 2021”, (Jakarta: MKRI, 2021).

Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020”, (Jakarta: MKRI, 2020).

Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 tanggal 28 Oktober 2021”, (Jakarta: MKRI, 2021).

Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 tanggal 28 Oktober 2021”, (Jakarta: MKRI, 2021).

Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tanggal 8 Februari 2010", (Jakarta: MKRI, 2010).

Laporan/Surat/Hasil Penelitian

Bank Indonesia, Tim peneliti, "Penanganan Krisis, Bahaya, Dan Bencana: Studi Terhadap Perumusan Regulasi Dan Koordinasi Kelembagaannya".

Biro Humas Kemeneg BUMN, "Penjelasan Kemeneg BUMN Tentang Strategi Penanggulangan Covid", (Jakarta, 2022), Surat No.S-308/S.MBU.B/12/2022 tanggal 2 Desember 2022.

Hasil Pemeriksaan BPK pada LKPP Tahun 2020 Audited.

Knowledge Note-2, "Cluster 2: Nonstructural Measures Disaster Management Plans", (Japan: GFDRR and The World Bank).

Buku

Anderson, James E., "*Public Policy Making*", Fifth Ed., (Boston & New York: Texas A&M University, 2003).

Arinanto, Satya, "Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia", (Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018).

Arinanto, Satya; Triyanti, Ninuk, "Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi (Kumpulan Tulisan dalam Peringatan Ulang Tahun Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H), Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Asshiddiqie, Jimly, "HTN Darurat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Asshiddiqie, Jimly, "Menuju Negara Hukum Yang Demokratis", (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009).

Asshiddiqie, Jimly, "Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia", (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

Asshiddiqie, Jimly, "Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara: Pasca Reformasi", Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- Asshiddiqie, Jimly, "Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia", dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial, 2012).
- Atmaja, I Dewa Gede, "Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis", (Malang: Setara Press, 2013).
- Bernanke, Ben S., "*21st Century Monetary Policy: The Federal Reserve from The Great Inflation to COVID-19*", (New York: W. W. Norton & Company, 2022).
- Black, Donald, "*The Behaviour of Law*"; Perilaku Hukum, Terjemahan: Th. Bambang Murtianto; Stevano Brando Thoviano, (Jakarta: Pelangi Cendikia dan PDH UKI, 2020).
- Boediono, "Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah", Cet. I, (Bandung: Penerbit Mizan, 2016).
- Bourn, Sir John, "*Public Sector Auditing: Is it value for money?*", (West Sussex: John Wiley & Sons, 2007).
- BPK RI, "Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Proses Perubahan Undang-Undang Negara Indonesia 1945", (Jakarta: BPK RI, 2012).
- Budiardjo, Miriam, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Caiden, Naomi; White, Joseph, "*Budgeting, Policy, Politics: An Appreciation of Aaron Wildavsky*", (Transaction Publishers: New Brunswick (USA) and London (UK), 1995).
- Cordery, Carolyn J; Hay, David C, "*Public Sector Audit*", (Routledge: London & New York, 2021).
- Creswell, John. W, "*Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*", Fourth Ed. Terjemahan Cet.2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Devlin, Alan, "*Fundamental Principles of Law and Economics*", (London and New York: Routledge, 2015).
- Djojohadikusumo, Sumitro, "Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan", (Jakarta: LP3ES, 1987).

- Dye, Thomas R, "*Understanding Public Policy*", Ed.14, (Boston: Pearson Education, Inc, 2013).
- Efendi, Jonaedi, "*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*", (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Foekh, Daniel Yusmic P., "Perpu Dalam Teori dan Praktik", (Jakarta: Rajawali Press, 2021).
- Friedman, Lawrence M., "*American Law An Introduction*", ed. Wishnu Basuki, 2nd ed. (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Friedman, Lawrence M., "*The Legal System; A Social Science Perspective*", (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Friedman, Lawrence M., "*The Legal System: A Social Science Perspective*", Terjemahan, Cet. II, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009).
- Fukuyama, Francis, "*The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*", (New York: Free Press, 1999).
- Goeltom, M.S. "Koordinasi Dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan Ke Depan (Koordinasi Kebijakan Moneter Dan Fiskal: Tantangan Dan Strategi Pemeliharaan Stabilitas Makro Dan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat)", (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012).
- Gross, Oren; Ni Aolain, Fionnuala, "*Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*", (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
- Hartono, Sunaryati, "Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Hindia Belanda", (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).
- Hartono, Sunaryati, "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional", (Bandung: Penerbit Alumni, 1991).
- Herdiansyah, Haris, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Jawahir, Thontowi, "*Makalah Pancasila Dalam Teori Hukum Inklusif*", (Yogyakarta, 2017).
- Kawilarang, Harry, "Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki", (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008).

- Kotter, John P., “*A Sense of Urgency: Kunci Penting dalam melakukan perubahan yang sukses*”, Terjemahan, (Jakarta: PT Gramedia, 2011).
- Lane, Jan-Erik; Ersson, Svante, “*Ekonomi Politik Komparatif; Demokratisasi dan Pertumbuhan Benarkah Kontradiktif?*” (Jakarta: Rajawali, Press, 2002).
- Latif, Abdul; Ali, Hasbi, “*Politik Hukum*”, Cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan*”, Jilid 2, edisi revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Manning, Chris; Dierman, Peter Van, “*Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-Apek Sosial Reformasi Dan Krisis*”, (Yogyakarta: LkiS, 2000).
- Marzuki, Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Mautz, R. K.; Sharaf, Hussein, A, “*The Philosophy of Auditing*”, Third Printing, (Wisconsin: American Accounting Association, 1967).
- Moh. Mahfud MD, “*Politik Hukum Di Indonesia*”, Revised (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Moh. Mahfud MD, “*Politik Hukum Di Indonesia*”, Cet.9, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).
- Moh. Mahfud MD, “*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*”, Ed.1 Cet.4, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Monteiro, Josef M, “*Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD NRI 1945*”, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014).
- Musgrave, Richard A, “*Public Finance in Theory and Practice*”, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1989).
- Oren dan Fionnuala ní Aoláin Gross, “*Law in Time of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice* (New York: Cambridge University Press, 2006).
- Parsons, Wayne, “*Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*”, Terjemahan, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

- Pieris, John, "Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum dan Sentralisme Kekuasaan: Refleksi Kritis tentang Kewenangan Presiden, MPR, DPR dan DPD", (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2019).
- Pieris, John, "Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI", Edisi Pertama, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007).
- Porter, Brenda, "*Principles of External Auditing In New Zealand*", (Palmerston North: The Dunmore Press Limited, 1993).
- Program Studi Hukum Program Doktor UKI, "Pedoman Penulisan Disertasi UKI 2021".
- Rawls, John, "*Justice as Fairness: A Restatement*", (London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001).
- Rawls, John, "*A Theory of Justice: Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Saragih, Bintan R, "Politik Hukum", (Bandung: CV Utomo, 2018).
- Sekretaris Jenderal BPK RI, "Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Proses Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945", (Jakarta: 2012).
- Sihombing, Herman, "HTN Darurat Di Indonesia", ed. 1, (Jakarta: Djambatan, 1996).
- Simatupang, Dian Puji N, "Keuangan-negara dan Kerugian Negara", Cet. Pertama, (Jakarta: FH UI & Damera Press, 2022).
- Simatupang, Dian Puji N, "Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan-negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah", (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011).
- Soetikno, "Filsafat Hukum Bagian 1", (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).
- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", ed.1, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya", (Yogyakarta: PT Kanisius, 1998).

- Soeprapto, Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan", ed.1 (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007).
- Sugiasuti, Natasya Yunita, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018).
- Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sumardjono, Maria SW, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014).
- Suseno, Franz Magnis, "Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern", Cet.8 (Revisi), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).
- Sutedi, Adrian, "Hukum Keuangan Negara", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Syaukani A. Ahsin; Imam dkk, "Dasar-Dasar Politik Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Trubus, Rahardiansah P, "Pengantar Ilmu Politik: Paradigma, Konsep Dasar Dan Relevansinya Untuk Ilmu Hukum", (Jakarta: Universitas Trisakti, 2006).
- Tuanakotta, Theodorus M, "Menghitung Kerugian Keuangan-negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Wheare, K.C, "Konstitusi-Konstitusi Modern (*Modern Constitutions*)", ed. Imam Baehaqie, 5th ed. (Bandung: Mahardika, 2015).
- Winarta, Frans Hendra, "Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum", (Jakarta, 2012).
- Wisner, B.; Blaikie; P.; Cannon, T.; Davis, I., "At risk: *Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*", 2nd Edition, (London: Routledge, 2004)
- Yamin, Muhammad, "Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945", Djilid Pertama, (Jajasan Prapantja, 1959).

Tugas Akhir

- Anggono, Bayu Dwi, "Asas Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Undang-Undang, serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-Undang

Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012)” (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2014).

Attamimi, A.Hamid S., “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-IV” (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990).

Erliyana, Anna. “Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Kurun Waktu Tahun 1987–1998: Tinjauan Asas Larangan Melampaui Wewenang” (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2004).

Foekh, Daniel Yusmic P, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Suatu Kajian Dari Perspektif HTN Normal Dan HTN Darurat”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2011).

Komandoko, Kukul, “Transformasi *Precutionary Principle* Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan di Indonesia”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2022).

Artikel Jurnal Ilmiah

Adhari, Agus. “Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Dialogia Iuridica*, Volume 11 Nomor 1, November 2019.

Aritonang, Dinoroy Marganda, “Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,” *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 2, (2010).

Atmadja, Arifin P Soeria, “Beberapa Pendekatan Kritis Analitis Terhadap Bab VII Hal Keuangan Pasal 23 UUD 1945”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Oktober 1994.

Atmadja, Arifin P Soeria, “Hak Budget DPR RI”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Januari 1984.

Cornell, Anna Jonsson and Salminen, Janne. “*Emergency Laws in Comparative Constitutional Law – The Case of Sweden and Finland.*” (2018). *German Law Journal*, Vol.19 No.02.

Curtin, Deirdre dan Senden, Linda, “*Public Accountability of Transnational Private Regulation: Chimera or Reality?*”, *Journal of Law and Society*, Vol. 38, No. 1 (2011).

- Effendy, Marwan, “*Apakah Suatu Kebijakan Dapat Di Kriminalisasi?*”. Makalah disampaikan dalam Seminar “*Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum*”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), di Hotel Bumi Karsa Bidakara – Jakarta, Selasa, 11 Mei 2010.
- English, Linda dan Guthrie, James “*Public Sector Auditing: A Case of Contested Accountability Regimes*”, *Australian Journal of Public Administration*, Vol. 50, No. 3 (1991).
- E, Rosya, N., Amar, S., Sofyan, “*Analisis Permintaan Agregat Dan Penawaran Agregat Di Sumatera Barat*,” *Jurnal Kajian Ekonomi* Volume 2 (2013).
- Faiz, Pan Mohamad, “*Teori Keadilan John Rawls*”, *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).
- Fatas & Mihov, “*Fiscal Policy as Stabilization Tool*,” *Journal of Macroeconomics* Volume 12 (2012).
- Friedman, Lawrence M, “*Law Reform in Historical Perspective*”, *Saint Louis University Law Journal*, Vol. 13, No. 3 (1969).
- Grogan, Joelle, “*States of Emergency*,” *European Journal of Law Reform* 22, no. 4 (December 2020): 338–354, <https://www.elevenjournals.com/doi/10.5553/EJLR/138723702021022004002>.
- Huda, Ni'matul, “*Pengujian PERPPU Oleh Mahkamah Konstitusi*”, *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010).
- Ismayawati, Any, “*Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*,” *Jurnal Pranata Hukum* 6, no. 1 (2011).
- Juda, Agung, “*Mengintegrasikan Kebijakan Moneter Dan Makroprudensial: Menuju Paradigma Baru Kebijakan Moneter Di Indonesia Pasca Krisis Global*”, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010).
- Kiraka, Ruth, Clark, Colin et.al, “*Public Sector Auditing, Accountability and Independence: A Study of ASEAN Countries*”, *Asian Review of Accounting*, Vol. 10, No. 2 (2002).

- Nurlina Zurjani, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Samudra Ekonomika* 2, no. 2 Oktober 2018 (2018).
- Oppusunggu, Yu Un, "Arti Penting Hukum Antartata Hukum untuk Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 2 (2018).
- Ozner, Jonathan., Bryce Friedman and Karen Hsu Kelley, "Covid19 Legal Issues: Company Obligations and Risk Harvard Law School Forum on Corporate Governance."
- Portes, Alexandre San Martim, "Chloroquine and the Politics of Health Regulation in Times of COVID-19", *Yale Journal on Regulation*, no. July 4 (2020).
- Prayitno, Cipto, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020).
- Rajagukguk, Blucer W., Najib Muhammad, "The Effect of Legal Political Determination of Perpu Number 1 of 2020 on Financial Markets in Indonesia During the COVID-19 Pandemic," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 3 (2021).
- Rajagukguk, Blucer W., Najib, Ramadhani, "Audit Strategy in COVID Period: An Approach of Political Law in Indonesia," *Asian Journal of Government Audit* (2020).
- Rajagukguk, Blucer; Pieris, John; Simatupang, et.al, "Measuring the Impact of COVID-19 Law Response and the Role of Supreme Audit Institutions", *Italienisch Journal*, Vol.12 No.2 (2022).
- Rajagukguk, Blucer; Yanaputra, I Gusti Bagus Tridarwata; Adrianus, Paulus, "Preparing Supreme Audit Institutions for The Sustainable Development Goals", *International Journal of Government Auditing*, Spring 2017, Vol.44, No.2, (Washington DC: US GAO, 2017).
- Ribkha, Annisa Octovina, "Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no.2 (2018).
- Scott, Colin, "Accountability in the Regulatory State", *Journal of Law and Society*, Vol. 27, No. 1 (2000).
- Scott P. Sheeran, "Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics", *Michigan Journal of International Law*, Volume 34, Issue 3, 2013.

Seto, Harianto Gregorius, “Kajian Filosofis Pembukaan UUD NRI 1945 Sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara,” *Jurnal Ketatanegaraan MPR RI Volume 001* (2016).

Siahaan, Maruarar, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010).

Sihotang, Githa Angela, Pujiyono, dkk., “Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat”, *Jurnal Law Reform*, Volume 1, Tahun 2017.

Soemardi, Dedi, “Hak Budget”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Januari 1984.

Subiyanto, Achmad Edi. “Mahkamah Konstitusi, Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Lex Jurnalica* 11, no. 1 (2014).

Pidato Resmi/Ilmiah

Adji, Indriyanto Seno, “Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara”. Makalah disampaikan dalam diskusi panel dengan topik “Kebijakan Aparatur Negara dan Pertanggungjawaban Pidana”, pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), (Bandung, 2 Desember 2010).

Asshiddiqie, Jimly, “Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat”, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR RI, (Jakarta, 6 Juli 2011).

Effendy, Marwan, “Apakah Suatu Kebijakan Dapat Di Kriminalisasi?”, Makalah disampaikan dalam Seminar oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing, di Jakarta, 11 Mei 2010.

Mulyani, Sri, “Pidato Menteri Keuangan pada *entry meeting* di BPK RI”, (Jakarta, 30 Maret 2022).

Mulyani, Sri, “Pidato Menteri Keuangan pada *exit meeting* di BPK RI”, (Jakarta, 24 Mei 2022).

Media Massa

Amaranggana, Caroline M, “Kilas Balik Indonesia Atasi Inflasi 500% Di Tahun 1996”, <https://www.pajakku.com/read/617a81c14c0e791c3760bbcf/Kilas-Balik-Indonesia-Atasi-Inflasi-500-Persen-Di-Tahun-1966>.

BPK RI, “Sejarah BPK”, <https://Www.Bpk.Go.Id/Menu/Sejarah>.

CARES ACT (*Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act*) adalah UU stimulus ekonomi terbesar dalam sejarah AS dengan nilai US\$ 2.2 trillion yang disusun sebagai respon atas kejatuhan ekonomi Amerika Serikat akibat pandemi Covid 19. <https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/about-the-cares-act>.

CNN Indonesia, “KPK Sebut Empat Titik Rawan Korupsi Penanganan Covid-19,” <https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200520135802-12-505294/Kpk-Sebut-Empattitik-Rawan-Korupsi-Penanganan-Covid-19>.

CNN Indonesia, “Pengamat: Bansos Sering Dipakai Dongkrak Popularitas”.

detiknews.com, “Kasus Bank Century Dan Risiko Keuangan-negara”, <https://news.detik.com/Opini/d-1247526/Kasus-Bank-Century-Dan-Risiko-Kuangan-Negara>.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, “Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)”, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020)

DPR RI, “Direktori DPR RI”, <http://www.Dpr.Go.Id>

Fajri, Dwi Latifatul, “Penyebab Dan Dampak Krisis Moneter Masa Reformasi 1998”, <https://katadata.co.id/Intan/Berita/620b718b6068c/Penyebab-Dan-Dampak-Krisis-Moneter-Masa-Reformasi-1998>.

<https://edition.cnn.com/2020/03/27/politics/coronavirus-stimulus-house-vote/index.html>

<https://www.nbcnews.com/politics/congress/house-members-race-back-washington-amid-fears-2-trillion-bill-n1170051>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/assistance-for-american-families-and-workers/economic-impact-payments>.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaf518c0f3c3/pandangan-jimly-terkait-perppu-penanganan-covid-19/>.

<https://setkab.go.id/pemerintah-resmi-cabut-status-pandemi-covid-19/>,

<https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-berakhirnya-status-pandemi-covid-19-di-indonesia/>.

Jawahir Gustav Rizal, “*Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?*”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia->.

Kiki Safitri, “*Omzet UMKM Diprediksi Anjlok 80 Persen Akibat Perpanjangan PPKM Darurat*,” <https://money.kompas.com/read/2021/07/21/103551026/omzet-umkm-diprediksi-anjlok-80-persen-akibat-perpanjangan-ppkm-darurat>.

Kompas.com, “*Digugat Ke MK, Pasal 27 Perpu 1/2020 Dinilai Buka Celah Korupsi*”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/16512311/digugat-ke-mk-pasal-27-perpu-1-2020-dinilai-buka-celah-korupsi>; Gatra, “*MK Diminta Nyatakan Pasal 27 Perpu 1/2020 Kontra UUD 1945*,” <https://www.gatra.com/detail/news/475131/hukum/mk-diminta-nyatakan-pasal-27-perpu-1-2020-kontra-uud-1945>.

Kompas.com, “*Pasal Imunitas Perpu 1 2020 Digugat Ke MK, Pemerintah Dinilai Manfaatkan Wabah*”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/17/12172991/pasal-imunitas-perpu-1-2020-digugat-ke-mk-pemerintah-dinilai-manfaatkan>.

Lisdiana Ulfa, “*Sistem Politik Demokrasi*”, <https://www.kompasiana.com/lisdianaulfa/59ba5591a7249b2f891f1e62/sistem-politik-demokrasi>.

Lidwina, Andrea. “*DPR dikuasai Partai Koalisi Jokowi*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/parlemen-dikuasai-partai-koalisi-jokowi>.

Mahkamah Konstitusi, “*Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi*”, <https://www.mkri.id/>.

Rice, Andrea, *medicalnews.today.com*, “*WHO says COVID-19 health emergency is over as mortality rates reach all-time low*”.

Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, “*3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi COVID-19 Bagi Peserta Didik Yang Harus Diwaspadai*,” <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai>.

Sari, Haryanti Puspa, “*DPR Sahkan Perppu Stabilitas Ekonomi Untuk Penanganan Covid-19 Jadi UU*”, <https://nasional.kompas.com/read/>

2020/05/12/16362121/Dpr-Sahkan-Perppu-Stabilitas-Ekonomi-Untuk-Penanganan-Covid-19-Jadi-Uu.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “DPR Setuju Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Jadi Undang-Undang,” <https://Setkab.Go.Id/Dpr-Setuju-Perpu-Nomor-1-Tahun-2020-Jadi-Undang-Undang>.

Thacher, Simpson and Ozner, Bartlett LLP, et.al, “Covid19 Legal Issues: Company Obligations and Risk: Harvard Law School Forum on Corporate Governance”, (*Harvard Law School Forum on Corporate Governance*), last modified 2020, <https://corpgov.law.harvard.edu/2020/04/02/covid19-legal-issues-company-obligations-and-risk/>.

Unofficial translation: “The Cambodian law about Nation Management in the State of Emergency”, <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/113250/141895/F1056401206/KHM113250.pdf>

World Health Organization, “Pneumonia of unknown cause – China”, <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unknown-cause-china/en/>.

Yusuf, Bukhori, “Beberapa Pasal Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Dinilai Kontroversial”, <https://Www.Dpr.Go.Id/Berita/Detail/Id/28272/t/Javascript>.